

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) IMPLAN DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Desa Jarang Kuantan dan Desa Ilir Mesjid)

Sabwan¹, Sugianor², Ahmad Baihaqi³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Email : Sabwan762@gmail.com

ABSTRAK

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di antara berbagai metode kontrasepsi, implan termasuk dalam kategori metode jangka panjang (MKJP) yang efektif dan efisien. Namun, implementasi program KB implan di tingkat desa seringkali menunjukkan hasil yang tidak merata. Permasalahan yang ada ialah Kurangnya kejelasan terhadap informasi, metode & pelayanan KB Implan, Kurangnya konsistensi dalam penyampaian informasi program KB implan, Banyak masyarakat yang belum memahami metode, dampak dan manfaat dari KB implan dan Kurangnya keterampilan petugas dalam mempromusikan program KB implan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi program dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program Keluarga Berencana Implan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) Implan Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara kurang terimplementasi, terlihat dari Sub variabel Komunikasi indikator transmisi kurang terimplementasi penyampaiaanya hanya dilakukan pada kegiatan posyandu saja, kejelasan kurang terimplementasi karena masyarakat merasa informasinya kurang jelas dan indikator konsistensi kurang terimplementasi dengan baik karena program implan ini tidak disampaikan secara rutin. Sub variabel sumber daya masih kurangnya keterampilan petugas dalam menyampaikan informasi KB Implan dan Sub variabel finansial bahwa tidak terdapat dana khusus yang secara konsisten dialokasikan untuk program KB Implan, disposisi komitmen pelaksanaan program KB Implan di kedua desa tersebut belum maksimal. Adapun variabel yang sudah terimplementasikan dengan baik antara lain: Pertama, wewenang pembagian wewenangnya sudah jelas. Kedua SOP cukup terimplemenasi karena SOP sudah jelas. Ketiga koordinasi antar instansi sudah berjalan dngan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertama, Kurangnya kejelasan mengenai informasi . Kedua, kurangnya keterampilan petugas dalam mempromusikan program KB implant. Ketiga, Kegiatan penyuluhan tidak dilakukan secara rutin dan tidak berkelanjutan. Adapun faktor Adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Disarankan Kepada Koordinator Balai penyuluhan Amuntai Selatan harus mengadakan pelatihan dan evaluasi berkala memberikan pelatihan teknis maupun komunikasi untuk penyuluh dan kader, serta mengadakan evaluasi berkala terhadap efektivitas penyuluhan yang dilakukan.

Kata kunci: Program Keluarga Berencana (KB) Implan

ABSTRACT

The Family Planning (KB) Program is one of the government's strategic efforts to suppress population growth and improve the quality of life of the community. Among various contraceptive methods, implants are included in the category of long-term methods (MKJP) which are effective and efficient. However, the implementation of the implant KB program at the village level often shows uneven results. The existing problems are the lack of clarity regarding information, methods & services for implant KB, lack of consistency in the delivery of implantable birth control program information, many people who do not understand the methods, impacts and benefits of implant KB and the lack of skills of officers in promoting the implant KB program. The purpose of this study is to determine the implementation of the program and the

factors that influence the implementation of the Implant KB program in the South Amuntai District, North Hulu Sungai Regency. Implementation of the Implant Family Planning (KB) Program in South Amuntai District, North Hulu Sungai Regency is poorly implemented, as seen from the Communication Sub-variable transmission indicator is poorly implemented, clarity is poorly implemented and consistency indicator is poorly implemented. The resource sub-variable is still unavailable expert staff in special handling of the Implant KB program and the financial sub-variable that there is no special fund that is consistently allocated for the Implant KB program, the disposition of the commitment to implement the Implant KB program in the two villages is not optimal. The variables that have been implemented well include: First, the authority of the division of authority is clear. Second, the SOP is sufficiently implemented because the SOP is clear. Third, coordination between agencies has been running well. Factors that influence First, Lack of clarity regarding information. Second, lack of skills of officers in promoting the implant KB program. Third, Extension activities are not carried out routinely and are not sustainable. The factors are the existence of clear standard operating procedures (SOP). It is recommended that the Coordinator of the South Amuntai Extension Center conduct periodic training and evaluations, provide technical and communication training for extension workers and cadres, and conduct periodic evaluations of the effectiveness of the extension carried out.

Keywords: Family Planning (KB) Implant Program

PENDAHULUAN

Pendidikan kesehatan melalui pelatihan tenaga kesehatan dapat membantu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dengan mendorong PUS mengambil keputusan tentang penggunaan alat kontrasepsi yang tepat dan efektif berdasarkan informasi dasar tentang alat kontrasepsi. Dampak pengetahuan terhadap pemilihan dan penggunaan alat kontrasepsi merupakan indikator yang baik mengenai pentingnya pendidikan kesehatan tentang kontrasepsi: pasangan yang kurang memiliki pengetahuan tentang kontrasepsi dan memiliki persepsi yang salah tentang risiko dan efek samping alat kontrasepsi menggunakannya secara tidak tepat, tidak konsisten, dan bahkan tidak tepat. berhenti menggunakannya (Pazol, 2015).

Berdasarkan data dari Capaian Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (CPR) di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2024, jumlah metode kontrasepsi jangka panjang lebih rendah dari pada metode kontrasepsi jangka pendek, terutama KB implan masih sedikit peminatnya dibandingkan dengan suntik sebanyak 1974 dan pil sebanyak 1385 . Menurut data dari balai penyuluh KB , jumlah perkiraan permintaan masyarakat (PPM) implan Sebanyak 115 dan Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kecamatan Amuntai Selatan sebanyak 4.853 dengan jumlah peserta KB aktif sebanyak 3.660 orang dan peserta KB baru sebanyak 220 orang, (JKN-PBI) 2.855 dan (JKN-NON PBI) 811 orang di tahun 2024.

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di antara berbagai metode kontrasepsi, implan termasuk dalam kategori metode jangka panjang (MKJP) yang efektif dan efisien. Namun, implementasi program KB implan di tingkat desa seringkali menunjukkan hasil yang tidak merata. Salah satu contohnya terlihat pada Desa Jarang Kuantan dan Desa Ilir Masjid di Kecamatan Amuntai Selatan.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) awal yang kemudian telah ditemukan fenomena-fenomena atau permasalahan yang ditemui, yaitu : Kurangnya kejelasan terhadap informasi, metode & pelayanan KB Implan sehingga masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui program KB

implant, Kurangnya konsistensi dalam penyampaian informasi program KB implan menyebabkan informasi tidak tersampaikan secara merata dan berkelanjutan kepada masyarakat, Banyak masyarakat yang belum memahami metode, dampak dan manfaat dari KB implan ini sehingga muncul isu-isu negatif dari penggunaan KB implan ini dan Kurangnya keterampilan petugas dalam mempromusikan program KB implan.

Penelitian terdahulu Nurbaiti, (2023) Dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai Program Studi Ilmu Administrasi Publik, dengan judul “ Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Program Keluarga Berencana (KB) Implan Di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Pandamaan Dan Desa Danau Panggang)” penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif dengan teknik penarikan menggunakan snowball sampling berjumlah 11 orang. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, partisipasi masyarakat dalam mengikuti program KB implan belum begitu baik karena, jarang diadakannya sosialisasi dan tempat pelaksanaannya masih banyak di Posyandu dan Bina Keluarga balita (BKB) di rumah masyarakat. Informasi yang kurang, penyuluh KB sudah karena sudah memberikan pendapat mengenai keuntungan dengan kekurangan KB Implan. Faktor- faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah memberikan pendapat, pemberian bingkisan dan program KB Implan gratis tanpa dipungut biaya. Faktor penghambat antara lain kurangnya sosialisasi, rasa takut yang berlebihan pada masyarakat untuk memakai KB Implan dan masyarakat masih terpengaruh isu-isu yang beredar.

METODE

Metode penelitian yang dipilih penulis adalah menggunakan pendekatan yang bersifat Kualitatif, pendekatan kualitatif yang bertujuan ingin memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan gejala-gejala lain dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Secara keseluruhan, informan yang dilibatkan berjumlah dua belas orang dengan menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan Pengumpulan data, Reduksi data dan Display data. Uji kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi diskusi dengan teman sejawat, analisa kasus negatif, dan member check.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) Implan Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Jarang Kuantan dan Desa Ilir Mesjid)

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek pertama yang harus ada agar pelaksanaan suatu kebijakan publik efektif. Komunikasi yang dimaksud adalah berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi publik dan terutama masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan/program dengan para pemangku kepentingan atau masyarakat umum. Dengan komunikasi maka tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atau penolakan atas kebijakan tersebut.

a. Transmisi

Transmisi merupakan faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak yang terkait dengan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian di kedua desa, metode utama dalam transmisi penyaluran informasi mengenai program KB Implan kurang terimplementasi dengan baik karena Di Desa Ilir Mesjid, informasi yang disampaikan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terbukti dari rendahnya tingkat pemahaman warga terhadap program KB implan. Sementara itu, di Desa Jarang Kuantan, transmisi informasi hanya dilakukan melalui penyuluhan di posyandu sebulan sekali, dengan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah. Sebagian masyarakat tidak memahami program secara jelas, dan keterbatasan tenaga kesehatan terlatih menyebabkan informasi teknis harus dialihkan kepada petugas dari luar desa, sehingga akses informasi menjadi terbatas.

b. Kejelasan

Kejelasan merupakan faktor kedua yang dikemukakan oleh Edward III. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Ketidak jelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Kejelasan isi kebijakan ini bisa berupa penyampaian secara komunikasi secara langsung kepada implementator ataupun secara sosialisasi.

Berdasarkan hasil penelitian di kedua desa, yaitu Desa Ilir Mesjid dan Desa Jarang Kuantan dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi program KB Implan kurang terimplementasi dengan baik karena informasi mengenai KB Implan dianggap belum terlalu jelas mengenai informasi tentang program KB Implan khususnya yang mana informasi yang diberikan hanya sebatas durasi pemakaian dan manfaatnya saja, terkait dengan dampak atau efek samping dari penggunaan implan belum disampaikan dengan jelas dan rinci, penyampaian materi program juga dinilai berbelit-belit dan kurang sistematis, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpahaman di kalangan masyarakat hal ini yang menyebabkan masyarakat takut menggunakan KB jenis implan.

c. Konsistensi

Konsistensi merupakan faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

Dari hasil penelitian tentang konsistensi di kedua desa ini dapat disimpulkan kurang terimplementasi dengan baik di Desa Ilir Mesjid, meskipun penyuluhan dilakukan secara rutin, materi yang disampaikan tidak secara berkelanjutan membahas KB implan secara mendalam. Informasi hanya difokuskan pada momen tertentu seperti peringatan Hari Keluarga Nasional, sementara di luar itu KB implan

tidak menjadi topik utama. Penyuluhan belum menjangkau seluruh masyarakat, dan penyampaian informasi oleh kader belum konsisten serta belum memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai dampak dan efek samping implan sementara itu, di Desa Jarang Kuantan, kegiatan penyuluhan juga tidak dilakukan secara rutin dan hanya berlangsung pada waktu-waktu tertentu. Informasi lebih banyak disampaikan oleh kader, dengan keterlibatan tenaga kesehatan yang masih terbatas. Materi penyuluhan cenderung bersifat umum dan tidak menjelaskan secara rinci manfaat, prosedur, maupun risiko penggunaan KB implan. Informasi yang diterima masyarakat menjadi terbatas, tidak merata, dan sulit dipahami.

2. Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu pemerintahan adalah kepemilikan terhadap sumberdaya. Implementasi kebijakan tidak akan efektif jika para implementer kekurangan sumber daya yang penting untuk melaksanakan kebijakan. Pentingnya sumberdaya dalam implementasi kebijakan mendapat perhatian.

a. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau petugas (street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salahsatunya disebabkan oleh staf/petugas yang tidak cukup memadai, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di kedua desa, yaitu Desa Ilir Mesjid dan Desa Jarang Kuantan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program KB Implan masih kurang terimplementasi dengan baik, terutama dari aspek sumber daya manusia, khususnya keterampilan petugas dalam menyampaikan informasi terkait program KB implan, di Desa Ilir Mesjid, kurangnya keterampilan petugas dalam memberikan informasi terkait program KB Implan menyebabkan banyak masyarakat yang tidak memahami dengan baik dampak dan manfaat dari penggunaan implan. Kader yang bertugas dianggap kurang terampil dalam menyampaikan informasi yang jelas dan rinci, sehingga masyarakat merasa kebingungan mengenai program ini. Hal serupa juga terjadi di Desa Jarang Kuantan, di mana keterampilan petugas dalam menyampaikan informasi dinilai belum memadai. Banyak masyarakat yang merasa bahwa penjelasan yang diberikan oleh petugas masih kurang jelas, terutama terkait dampak dari penggunaan implan. Akibatnya, pemahaman masyarakat mengenai program KB Implan secara keseluruhan menjadi terbatas.

b. Finansial

Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis serta memonitor program, yang semuanya itu perlu biaya.

Hasil penelitian di dua desa, yaitu Desa Ilir Mesjid dan Desa Jarang Kuantan, dapat disimpulkan bahwa sumber daya finansial di kedua desa kurang terimplementasi dengan baik karena tidak terdapat dana khusus yang secara konsisten dialokasikan untuk program KB Implan. Pelaksanaan program lebih

bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tergantung pada ketersediaan dana dari berbagai sumber seperti BPJS, BKKBN, dana provinsi, atau dana desa. Ketergantungan ini menyebabkan keberlanjutan program tidak dapat dijamin sepenuhnya, sehingga layanan KB Implan menjadi tidak merata dan bergantung pada momen tertentu saja ini menunjukkan bahwa keberlanjutan program KB Implan di kedua desa tersebut masih belum terjamin, dan layanan yang diberikan bergantung pada kesempatan, kolaborasi lintas sektor.

c. Wewenang

wewenang sebagai bagian dari sumber daya, merupakan hal yang esensial karena menyangkut kejelasan siapa yang berhak melakukan apa dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa kejelasan wewenang, pelaksanaan di lapangan akan mengalami kebingungan dan potensi konflik antar pelaksana. Wewenang yang jelas akan memperlancar koordinasi dan pembagian tugas.

Dari hasil penelitian di dua desa, dapat disimpulkan bahwa aspek wewenang dalam pelaksanaan program KB Implan telah terimplementasi dengan baik di Desa Ilir Mesjid dan Desa Jarang Kuantan, di kedua desa. Masing-masing pihak yang terlibat telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Di Desa Ilir Mesjid, penyuluh KB memberikan konseling dan informasi kepada kader untuk diteruskan kepada masyarakat, sedangkan bidan melaksanakan tindakan medis berupa pemasangan implan. Hal serupa juga ditemukan di Desa Jarang Kuantan, di mana balai penyuluhan berperan dalam penyediaan informasi dan layanan konseling, kader bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat, dan pelaksanaan teknis dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti bidan.

3. Disposisi

Menurut teori George C. Edward III dalam (Dwiyanto Indiahono, 2017: 31-38) bahwa jika para implementor/pelaksana ingin melaksanakan sebuah kebijakan tertentu, maka mereka harus dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, tetapi ketika sikap atau pandangan para pelaksana berbeda dengan sipembuat kebijakan maka proses akan pelaksanaan sebuah kebijakan akan menjadi kompleks. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif.

a. Komitmen

Salah satu faktor utama kesuksesan implementasi sebuah kebijakan adalah adanya komitmen yang kuat dari aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Komitmen mencakup keseriusan dan kesungguhan agar penerapan suatu peraturan ataupun kebijakan bisa berjalan dengan baik dan diterima serta dipatuhi oleh sasaran dari kebijakan tersebut. Komitmen yang dimaksud yaitu komitmen kerja atau bisa juga komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah salah satu sikap kerja dan tingkat keyakinan pegawai dalam mengidentifikasikan dirinya dengan suatu bagian dari organisasi yang direfleksikan melalui penerimaan terhadap upaya pencapaian nilai-nilai, tujuan, kesiapan dan kesediaan untuk berusaha sungguh-sungguh serta keinginan untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di dua desa yaitu Desa Ilir Mesjid dan Desa Jarang Kuantan apek komitmen dapat disimpulkan kurang terimplementasi dengan baik karena tingkat komitmen pelaksanaan program KB Implan di kedua desa tersebut belum maksimal. Di Desa Ilir Mesjid, walaupun komitmen secara verbal dinyatakan dan ada sejumlah capaian, realisasi target belum tercapai. Sedangkan di Desa Jarang Kuantan, pelaksanaan program hampir tidak berjalan sama sekali, tanpa adanya akseptor dan dengan keterlibatan petugas yang sangat minim. Kedua desa menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap implementasi program, peningkatan edukasi kepada masyarakat, serta penguatan peran aktif bidan dan kader dalam mempromosikan KB Implan sebagai metode kontrasepsi jangka panjang yang aman dan efektif.

b. Insentif

Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

Hasil penelitian di kedua desa menunjukan bahwa di Desa Ilir Mesjid dan Desa Jarang Kuantan terkait dana insentif dari program KB Implan di kedua desa kurang terimplementasi dengan baik, dapat disimpulkan bahwa dana insentif dalam pelaksanaan program KB Implan di Desa Ilir Mesjid karena tidak tersedia dana insentif tunai Pemberian insentif hanya berupa sembako itupun hanya pada momen-momen tertentu dan bersifat tidak terstruktur. Sedangkan di Desa Jarang Kuantan, kondisi serupa juga terjadi, di mana tidak terdapat sistem kompensasi finansial khusus bagi petugas maupun peserta program. Petugas dan kader menjalankan tugas tanpa insentif tambahan, dan masyarakat hanya menerima souvenir atau sembako secara tidak rutin.

4. Struktur Birokrasi

merupakan variable keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, istilah "birokrasi mengacu pada bagaimana organisasi fungsi birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan. Mekanisme ini biasanya sudah ditetapkan melalui setandar prosedur (SOP) yang mencantumkan kerangka kerja yang jelas, serta struktur organisasi pars pelaksana, termasuk dalam komponen birokrasi ini.

a. SOP

Salah satu struktur paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur dasar kerja (standard operational procedure). Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia, selain itu SOP juga menyeragami tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan. SOP adalah suatu prosedur yang terencana rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian di kedua desa menunjukan SOP program KB implan cukup implementasi karena di Desa Ilir Mesjid melaksanakan SOP program KB Implan telah terimplementasi dengan baik. Tenaga kesehatan dan petugas lapangan KB

menunjukkan kinerja yang tertib dan profesional dalam memberikan pelayanan, terutama pada tahap pemasangan implan. Proses penyuluhan kepada calon akseptor dilakukan sebelum tindakan, dengan penyampaian informasi yang memadai dan sesuai prosedur. Sebaliknya, di Desa Jarang Kuantan, meskipun SOP telah tersedia dan petugas kesehatan memahami prosedur pelaksanaan program, implementasi di lapangan belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya masyarakat yang menggunakan KB Implan, sehingga SOP tidak dapat diterapkan secara nyata dalam kegiatan pelayanan. akhirnya berdampak pada tidak berfungsinya SOP secara optimal.

b. Koordinasi Antar Instansi

koordinasi antar instansi merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Koordinasi ini melibatkan kerja sama dan komunikasi yang efektif antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan agar tujuan kebijakan dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian di dua desa dapat disimpulkan bahwa koordinasi terkait program KB implan sudah terimplementasi dengan baik di Desa Ilir Mesjid, dapat disimpulkan bahwa koordinasi sudah berjalan lancar terlihat dari komunikasi yang efektif, kerja sama yang baik, serta pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antar pihak terkait. Pelaksanaan kegiatan KB Implan berlangsung secara terstruktur, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan koordinasi dalam program KB Implan telah berjalan dengan baik dan efektif. Sementara itu, di Desa Jarang Kuantan, hasil wawancara dan observasi juga menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi dalam program KB telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari kelancaran program serta kerja sama yang efektif antar pihak-pihak yang terlibat.

B. Faktor- faktor yang memengaruhi Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) Implan Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Jarang Kuantan dan Desa Ilir Mesjid)

1. Faktor penghambat

a. Kurangnya Kejelasan Mengenai Informasi Program KB Implan Yang Disampaikan Oleh Penyuluh Dan Kader KB

Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan oleh penyuluh dan kader dalam program KB Implan merupakan salah satu faktor penghambat utama dalam keberhasilan program tersebut. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan terjadinya perbedaan makna, di mana pesan yang diterima oleh masyarakat menjadi berbeda bahkan bertentangan dengan maksud sebenarnya dari program hal ini tercermin dari masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai aspek penting dari KB Implan, seperti dampak penggunaan, prosedur pemasangan, serta kelebihan-kelebihannya. Kurangnya informasi yang akurat dan lengkap membuka ruang bagi berkembangnya mitos dan informasi yang keliru, yang pada akhirnya menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap penggunaan KB Implan. Yang sebagaimana ketidak jelasan informasi yang didapatkan oleh masyarakat terkait program KB implan ini yaitu tentang kejelasan terkait dampak dan metode pemasangan KB implan ini dan kelebihan-kelebihan KB implan karena masyarakat masih banyak yang terkecoh dengan mitos – mitos tentang KB implan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di kedua desa, yaitu Desa Ilir Mesjid dan Desa Jarang Kuantan dapat disimpulkan bahwa Di Desa Ilir Mesjid, penyampaian informasi oleh pihak pelaksana dinilai masih kurang jelas dan tidak rinci. Materi yang disampaikan lebih banyak terfokus pada aspek teknis, seperti prosedur pemasangan dan durasi pemakaian implan, sementara penjelasan mengenai efek samping serta cara penanganannya belum disampaikan secara menyeluruh dan sistematis. Hal serupa juga terjadi di Desa Jarang Kuantan, di mana informasi yang diberikan kepada masyarakat kurang jelas sebagian besar masyarakat mengaku tidak memahami secara utuh mengenai manfaat, dampak, dan risiko penggunaan KB Implan informasi yang disampaikan oleh kader maupun tenaga kesehatan di kedua desa cenderung membingungkan, informasi yang diberikan hanya sebatas durasi pemakaian dan mafaatnya saja, terkait dengan dampak atau efek samping dari penggunaan implan belum disampaikan dengan jelas dan rinci, penyampaian materi program juga dinilai berbelit-belit dan kurang sistematis, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpahaman di kalangan masyarakat hal ini yang menyebabkan masyarakat takut menggunakan KB jenis implan.

b. Kurangnya Keterampilan Petugas Dalam Mempromosikan KB Jenis Implan

Kurangnya keterampilan petugas menjadi salah satu faktor penghambat dalam keberhasilan pelaksanaan program KB Implan khususnya kemampuan Kader dalam menyampaikan informasi secara umum, tanpa pendekatan edukatif yang mendalam dan persuasif kepada masyarakat. Akibatnya, pesan mengenai manfaat, cara kerja, dan keamanan KB Implan tidak tersampaikan secara optimal, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilih metode kontrasepsi ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di kedua desa, yaitu Desa Ilir Mesjid dan Desa Jarang Kuantan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program KB Implan masih kurang terimplementasi dengan baik, terutama dari aspek sumber daya manusia, khususnya keterampilan petugas dalam menyampaikan informasi terkait program KB implan, di Desa Ilir Mesjid, kurangnya keterampilan petugas dalam memberikan informasi terkait program KB Implan menyebabkan banyak masyarakat yang tidak memahami dengan baik dampak dan manfaat dari penggunaan implan. Kader yang bertugas dianggap kurang terampil dalam menyampaikan informasi yang jelas dan rinci, sehingga masyarakat merasa kebingungan mengenai program ini. Hal serupa juga terjadi di Desa Jarang Kuantan, di mana keterampilan petugas dalam menyampaikan informasi dinilai belum memadai. Banyak masyarakat yang merasa bahwa penjelasan yang diberikan oleh petugas masih kurang jelas, terutama terkait dampak dari penggunaan implan. Akibatnya, pemahaman masyarakat mengenai program KB Implan secara keseluruhan menjadi terbatas.

c. Kegiatan Penyuluhan Tidak Dilakukan Secara Rutin dan Tidak Berkelanjutan Dalam Membahas Tentang KB Implan

Kurangnya konsistensi dalam kegiatan program KB Implan merupakan salah satu faktor penghambat dalam implementasi program KB Implan. program yang tidak dilakukan secara rutin dan terjadwal menyebabkan informasi mengenai metode KB Implan tidak tersampaikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Program cenderung dijalankan hanya pada momen-momen tertentu, seperti peringatan Hari Keluarga Nasional atau hari besar lainnya, tanpa keberlanjutan

dalam bentuk kegiatan penyuluhan yang terstruktur. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak mendapatkan edukasi yang memadai mengenai manfaat, mekanisme kerja, maupun efek samping dari penggunaan KB Implan.

Dari hasil penelitian tentang konsistensi di kedua desa ini dapat disimpulkan kurang terimplementasi dengan baik di Desa Ilir Mesjid, meskipun penyuluhan dilakukan secara rutin, materi yang disampaikan tidak secara berkelanjutan membahas KB implan secara mendalam. Informasi hanya difokuskan pada momen tertentu seperti peringatan Hari Keluarga Nasional, sementara di luar itu KB implan tidak menjadi topik utama. Penyuluhan belum menjangkau seluruh masyarakat, dan penyampaian informasi oleh kader belum konsisten serta belum memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai dampak dan efek samping implan sementara itu, di Desa Jarang Kuantan, kegiatan penyuluhan juga tidak dilakukan secara rutin dan hanya berlangsung pada waktu-waktu tertentu. Informasi lebih banyak disampaikan oleh kader, dengan keterlibatan tenaga kesehatan yang masih terbatas. Materi penyuluhan cenderung bersifat umum dan tidak menjelaskan secara rinci manfaat, prosedur, maupun risiko penggunaan KB implan. Informasi yang diterima masyarakat menjadi terbatas, tidak merata, dan sulit dipahami.

2. Faktor pendukung

a. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Yang Jelas Terkait Program KB Implan

Keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program KB Implan menjadi salah satu faktor pendorong yang penting. SOP memberikan pedoman yang jelas bagi tenaga pelaksana, mulai dari penyuluhan, proses pelayanan, hingga prosedur pemasangan implan. Hal ini memudahkan koordinasi antar pelaksana, seperti penyuluh, bidan, dan kader, serta memastikan bahwa setiap kegiatan dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan adanya SOP yang baku, pelaksana dapat menjalankan tugasnya dengan lebih terarah dan bertanggung jawab, sehingga mendukung pencapaian target program KB Implan secara lebih efektif dan terstruktur.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Ilir Mesjid dan Desa Jarang Kuantan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) Implan menunjukkan hasil yang berbeda. Di Desa Ilir Mesjid, SOP telah terimplementasi dengan baik, ditandai dengan pelaksanaan program yang mengacu pada prosedur resmi dari instansi terkait. Petugas kesehatan dan pelaksana program menjalankan tugas sesuai pedoman yang telah ditetapkan. Sebaliknya, di Desa Jarang Kuantan, meskipun SOP telah tersedia dan dipahami oleh petugas di lapangan, implementasinya belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat, yang mengakibatkan SOP tidak dapat dijalankan secara nyata dalam praktik pelayanan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi SOP sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat sebagai sasaran program.

SIMPULAN

Implementasi Program Keluarga Berencana (KB) Implan Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Jarang Kuantan dan Desa Ilir Mesjid) kurang terimplementasi, terlihat dari Sub variabel Komunikasi indikator transmisi kurang terimplementasi karena penyampaiaanya hanya dilakukan pada krgiatan posyandu saja dan tidak semua masyarakat ikut dalam kegiatan itu kemudian ada sub kejelasan kurang terimplementasi karena kejelasan

pelaksanaan program KB implan masih dianggap masyarakat tidak jelas dalam penyampaian kebijakan dari pelaksanaannya dan indikator konsistensi kurang terimplementasi dengan baik karena program implan ini tidak disampaikan secara rutin. Sub variabel sumber daya masih kurangnya keterampilan petugas dalam menyampaikan informasi KB Implan dan Sub variabel finansial bahwa tidak terdapat dana khusus yang secara konsisten dialokasikan untuk program KB Implan, disposisi komitmen pelaksanaan program KB Implan di kedua desa tersebut belum maksimal. Di Desa Ilir Mesjid, walaupun komitmen secara verbal dinyatakan dan ada sejumlah capaian, realisasi target belum tercapai. Sedangkan di Desa Jarang Kuantan, pelaksanaan program hampir tidak berjalan sama sekali dan insentif untuk para petugas dan akseptor implan itu tidak mendapatkan insentif hanya dipelayanan saja gratis kecuali untuk para akseptor yang memasang implan pada hari kontrasepsi sedunia yang diadakan oleh kecamatan baru mendapat insentif berupa suvenir dan sembako. Adapun variabel yang sudah terimplementasikan dengan baik antara lain: Pertama, wewenang pembagian wewenangnya sudah jelas. Kedua SOP cukup terimplemenasi karena SOP sudah jelas. Ketiga koordinasi antar instansi sudah berjalan dngan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Keluarga Berencana (KB) Implan di Desa Ilir Mesjid dan Desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut: Pertama, Kurangnya kejelasan mengenai informasi program KB implan yang disampaikan oleh penyuluh dan kader KB yaitu kejelasan informasi yang disampaikan petugas penyuluh dan kader terkait program KB implan ini masih belum terlalu jelas Informasi mengenai program KB Implan yang disampaikan oleh penyuluh dan kader di kedua desa masih belum jelas, terutama terkait dampak atau efek samping penggunaan implan yang menyebabkan masyarakat takut dalam menggunakan implan. Kedua, kurangnya keterampilan petugas dalam mempromusikan program KB implan yang menyebabkan banyak masyarakat yang tidak memahami dengan baik dampak dan manfaat dari penggunaan KB implan ini Ketiga, Kegiatan penyuluhan tidak dilakukan secara rutin dan tidak berkelanjutan dalam membahas tentang KB implan yang menyebabkan informasi tidak tersampaikan secara merata dan berkelanjutan kepada masyarakat karena penyebaran informasinya hanya dilakukan pada momen – momen khusus saja itu pun kader KB tidak selalu membahas tentang KB jenis Implan saja, Adapun faktor pendorong yang mempengaruhi implementasi Program Keluarga Berencana (KB) Implan di Desa Ilir Mesjid dan Desa Jarang Kuantan Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu pertama yaitu dilihat dari indikator Adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas karena memberikan panduan struktur dan dapat diandalkan dalam kegiatan program KB Implan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi Biran, Sarwono Prawirohardjo, 2011 Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi. Jakarta : PT. Bina Pustaka.
- Ibrahim, M. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Indiahono, Dwiyanto (2017). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Riyadi, A. A. (2015). Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar-dasar metodologi penelitian. Yogyakarta: Literasi.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sutrisno, E. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana.



Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara. (2023). Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Angka 2023. Amuntai: BPS HSU.

Prijatni, & Sri Rahayu, S. (2016). Kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Pusdik SDM Kesehatan. Diambil dari <http://eprints.triatmamulya.ac.id>

Sharma, V., et al. (2021). Male Sterilization: A Review of Barriers and Opportunities. *Journal of Men's Health*, 17(3).diambil dari DOI: 10.1089/jomh.2020.0253

WHO (2020). Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use.

Diambil dari : WHO Guidelines

Andi Aulia Farhana Yusran, (2022) Implementasi Program Keluarga Berencana (Kb) Di Puskesmas Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar. Universitas Hasanuddin Fakultas Kesehatan Masyarakat Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Makassar

Affrian, R. (2025) ‘Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah’, *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.

Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) ‘Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Administraus*, 9(2), pp. 26–33.

Setiawan, I. (2025) ‘Fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.

Nurbaiti, (2023) Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Program Keluarga Berencana (KB) Implan Di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Pandamaan Dan Desa Danau Panggang). Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai Program Studi Ilmu Administrasi Publik.